



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2023

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah Subhanallahu Wa ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRD selama lima tahun kedepan. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyediakan rencana teknis lima tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu sehingga dokumen ini dapat diselesaikan. Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance and Clean Government*) menuju Kepulauan Riau Makmur Berdaya Saing dan Berbudaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

Tanjungpinang, Februari 2022
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



MARTIN LUTHER MAROMON, S.Sos M.Si
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19670306 199703 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan Renja Sekretariat DPRD.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT	
 TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Renja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD.....	10
2.2. Analisn Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III Tujuan dan Sasaran.....	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	40
3.2. Arah Kebijakan Tahun 2023 Berdasarkan isu strategis dan Dokumen RPJMD Tahun 2021- 2026.....	40
3.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	47
BAB V PENUTUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana. Paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu atau terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancangan perencanaan juga dilakukan

untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap PD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-PD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD. Renstra-PD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-PD tersebut, maka PD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-PD) untuk periode 1(satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada

Renstra-PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja Sekretariat DPRD) dalam penyusunannya sudah mempedomi peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di provinsi kepulauan riau, ada 4 (empat) sub kegiatan dan 2 program terkait pengarusutamaan gender di Renja Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja Sekretariat DPRD) Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode 2021 yang memuat rencana arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di dasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan dengan ke sekretariatan DPRD dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ke sekretariatan DPRD. Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara

efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimal di dalam menentukan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun Nasional melalui membangun suatu sistem rancangan perencanaan yang partisipatif, implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Sekretariat DPRD guna mencapai sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembar Negara RI Tahun 2017 nomor 136);
 14. Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau;

15. Keputusan Presiden Nomor 60/P tahun 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarus utamaan gender;
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
23. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, tambahan lembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun 2009 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepri tahun 2021-2026;
31. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
32. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor .. Tahun 2022 tentang tentang rkpd 2023
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan;

2. Sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sebagai Sebagai dasar / acuan kelurahan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan;
4. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan Karangsari Tahun Anggaran 2023;
5. Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan tahun 2023 dan ;
6. Memberikan gambaran tentang prioritas program yang akan dilaksanakan Kelurahan Karangsari pada Tahun 2023.

Tujuan penyusunan renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau :

- Sebagai media yang dapat dijadikan sumber dasar penyusunan rencana kerja;
- Agar tersedia kelengkapan dokumen perencanaan yang akan menjadi arah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2021

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN;

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah, Arah Kebijakan Tahun 2021 Berdasarkan Dokumen Perubahan Dokumen RPJMD Tahun 2016-

2021, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021, Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD selama kurun waktu tahun 2021-2026.

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, Jumlah Program/Kegiatan di Renja Tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Kepri program 2 (dua), kegiatan : 15 (lima belas) dan sub kegiatan : 36 (tiga puluh enam). Jumlah program/Kegiatan DPPA Tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Kepri: program : 2 (dua), kegiatan : 15 (lima belas) dan sub kegiatan : 36 (tiga puluh enam). dapat diartikan keselarasan antara program pada Renja dan DPA, disini sekretariat dewan masih konsistensi pada dokumen perencanaan yang telah tersedia.

Rata-rata capaian kinerja indikator kegiatan perangkat daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kepri di Triwulan I : 12,81 %, Triwulan II : 28,00 %, Triwulan III : 47,36 % dan Triwulan IV : 86,03 %. Rata-rata capaian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Kepri sampai dengan Triwulan I : 1,58 %, Triwulan II : 46,29 %, Triwulan III : 49,26, Triwulan IV : 86,03. Sekretariat DPRD Provinsi Kepri di triwulan IV ini terdapat 5 (lima) Sub Kegiatan yang capaian kinerjanya rendah atau tidak mencapai target diantaranya : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, Bimbingan Teknis DPRD.

Kendala atau permasalahan terhadap capaian kegiatan yang tidak mencapai target :

- 1) Ada sub kegiatan kena efisien sehingga tidak dilaksanakan.
- 2) Ada sub kegiatan yang belum dilaksanakan sampai triwulan III.
- 3) Ada kegiatan yang sudah dilaksanakan namun outputnya belum diketahui hasilnya karena produk akhir belum selesai.

- 4) Adanya PPKM yang mengakibatkan kegiatan tidak bisa dijalankan
- 5) Pada Proses pencairan dan Penatausahaan keuangan yang masih belum jelas, karena terjadinya peralihan penggunaan aplikasi dari SIMDA ke SIPD, namun fisik sudah berjalan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renja sampai dengan triwulan IV Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mengelola anggaran belanja langsung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.157,329,298,780.00 sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 terserap sebesar Rp.151,513,458,342,00 (99,30%) Anggaran tersebut digunakan untuk 2 Program dengan realisasi anggaran dan realisasi kinerja masing-masing program dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode Pelaksanaan: 2021

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan dan Sub	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan		Satuan
						Target Renja OPD tahun 2021	Realisasi Renja OPD tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(4+5+7+9)	11=(10/4)	
I	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor									
1	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen		1Dokumen	1Dokumen	1	1Dokumen	1	1	
2	4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen		1Dokumen	1Dokumen	1	1Dokumen	1	1	

3	4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1Dokumen		3Dokumen	3Dokumen	1	1Dokumen	1	1	
4	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		25Dokumen	25Dokumen	25	1Dokumen	1	1	
5	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1Dokumen	1Dokumen	1	1Dokumen	1	1	
2	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	100 %								
	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		14Bulan	14Bulan	1	14 Bulan	1	1	
	4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		14Bulan	14Bulan	1	12 Bulan	1	1	

	4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1Dokumen	1Dokumen	1	12 Bulan	1	1	
	4.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1Dokumen	1Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1Dokumen	1Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
3	4. 02. 01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi									
	4. 02. 01. 1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		12Bulan	12Bulan	1	178Stel	1	1	
	4. 02. 01. 1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		Kali	0	0				
	4. 02. 01. 1.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		Kali	0	0	60Orang	1	1	

	4. 02. 01. 1.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		Bulan	0	0	60Orang	1	1	
4	4. 02. 01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan								
	4. 02. 01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		12Bulan	12Bulan	1	150 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12Bulan	12Bulan	1	12 Bulan	1	1	
	4. 02. 01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		12Bulan	12Bulan	1	12 Bulan	1	1	
	4. 02. 01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		12Bulan	0	0	80 Orang	1	1	

	4. 02. 01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	10 Unit								
	4. 02. 01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket					100 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit 15					15 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit 1		12Bulan	12Bulan	1	10 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit 6					6 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit 6					6 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayanan	12 Bulan								

4. 02. 01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		12 Bulan	12 Bulan	1	4 Rekening	1	1	
4. 02. 01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		12 Bulan	12 Bulan	1	12 Bulan	1	1	
4. 02. 01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kondisi baik	100 %								
4. 02. 01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit								
4. 02. 01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit					60 Unit	1	1	
4. 02. 01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit								

	4. 02. 01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit					5 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	500 Unit		12 Bulan	12 Bulan	1	500 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit								
	4. 02. 01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit								
	4. 02. 01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit					8 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya	100 %								

	4. 02. 01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan					12 Bulan	1	1	
	4. 02. 01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket		12 Bulan	12 Bulan	1	225 Stel	1	1	
	4. 02. 01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		12 Bulan	12 Bulan	1	45 Orang	1	1	
	4. 02. 01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPR	12 Bulan								
	4. 02. 01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan		12 Bulan	12 Bulan	1	8 Fraksi	1	1	
	4. 02. 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	80 Skor								
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %								

	4. 02. 02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	3 Dokumen								
	4. 02. 02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		2 Perda	0	0	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen		18 Produk Hukum	2 Produk Hukum	0.11	7 Ranperda	1	1	
	4. 02. 02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen		12 Bulan	12 Bulan	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen		7 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)									

	4. 02. 02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen		2 Kali	2 Kali	1	2 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	100 %								
	4. 02. 02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		12 Bulan	12 Bulan	1	45 Orang	1	1	
	4. 02. 02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen		12 Bulan	12 Bulan	1	250 Kali	1	1	
	4. 02. 02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang					2 Tim	1	1	
	4. 02. 02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	36 Orang					36 Orang	1	1	
	4. 02. 02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen		12 Bulan	12 Bulan	1	24 Kali	1	1	
	4. 02. 02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil									

4. 02. 02.1.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan						495 Kali	1	1	
4. 02. 02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		100 Buku	100 Buku	1	1 Dokumen	1	1		
4. 02. 02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen		3 Kali	3 Kali	1	7 Dapil	1	1		
4. 02. 02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal	100 %									
4. 02. 02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen					2970 Kali	1	1		
4. 02. 02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan					1 Laporan	1	1		
4. 02. 02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen					12 Kali	1	1		

	4. 02. 02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen					12 Kali	1	1	

2.2 Analisin Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skors	70	72	74	76	78	80	70	72	74	76
2	Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	%	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	n/a	100	100	100	100	100	n/a	100	100	100
4	Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase layanan administrasi keuangan DPRD	%	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100
7	Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase kecukupan sarana prasarana	%	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100
10	Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase kecukupan penunjang	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
	fasilitas											
13	Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase pemeliharaan n milik daerah	%	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100
15	Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Rata-rata capaian kinerja indikator kegiatan perangkat daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kepri di Triwulan I : 12,81 %, Triwulan II : 28,00 %, Triwulan III : 47,36 % dan Triwulan IV : 86,03 %. Rata-rata capaian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Kepri sampai dengan Triwulan I : 1,58 %, Triwulan II : 46,29 %, Triwulan III : 49,26, Triwulan IV : 86,03.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra dan penelaahan terhadap tugas, fungsi dan kewenangan maka dapat disampaikan bahwa permasalahan di Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Struktur organisasi	Permasalahan yang Dihadapi
Umum dan Kehumasan	1. Lemahnya manajemen panganan administrasi surat menyurat 2. Keberadaan Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum memadai 3. Pelayanan yang belum optimal dan tepat sasaran 4. Minimnya sarana baca dan referensi 5. Pola penanganan keprotokolan yang belum profesional dan tepat 6. Tidak terkelolanya data base dokumentasi
Persidangan, Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan	1. Sarana dan prasarana persidangan yang belum optimal 2. SDM yang kurang memadai dan responsif dalam pelayanan persidangan dan produk hukum.

Struktur organisasi	Permasalahan yang Dihadapi
Keuangan, Perencanaan dan Anggaran	1. Sistem pertanggung jawaban yang belum tertata dengan baik 2. Terbatasnya kemampuan teknis aparat dalam mengelola dan menganalisis data 3. Penguasaan teknologi informasi Pegawai masih rendah dan belum dapat memenuhi tuntutan tugas 4. Kemampuan dan kesiapan dalam verifikasi data yang perlu dipertajam dan lebih teliti

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 tabel 2.1

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	1 Dokumen	84,387,930,211	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	1 Dokumen	84,387,930,211	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	900,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	900,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	200,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	200,000,000	

		Provinsi Kepri	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				Provinsi Kepri	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100,000,000	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	200,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	200,000,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	100%	50,656,896,237	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	100%	50,656,896,237	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14*Orang/B ulan	49,206,896,237	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14*Orang/B ulan	49,206,896,237	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	850,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	850,000,000	

8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	200,000,000	
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	200,000,000	
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	200,000,000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	12 Bulan	1,100,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	12 Bulan	1,100,000,000	
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	500,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	500,000,000	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	300,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	300,000,000	
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti	60 Orang	150,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti	60 Orang	150,000,000	

		Daerah Provinsi Kepri	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Daerah Provinsi Kepri	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	150,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	150,000,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	15,989,103,763	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	15,989,103,763	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000,000	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,689,103,763	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,689,103,763	
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6,000,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6,000,000,000	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300,000,000	

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset yang diadakan	10 Unit	3,000,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset yang diadakan	10 Unit	3,000,000,000	
19	Pengadaan Mebel	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	400,000,000	Pengadaan Mebel	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	400,000,000	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	70,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	70,000,000	
21	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	680,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	680,000,000	
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1,000,000,000	
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	850,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	850,000,000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggara	12 Bulan	6,891,005,787	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggara	12 Bulan	6,891,005,787	

			raan pelayan			Daerah		raan pelayan			
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000,000	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,891,005,787	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,891,005,787	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana kondisi baik	100%	4,100,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana kondisi baik	100%	4,100,000,000	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	80,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	80,000,000.00	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	20.000.000,00	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit 5	80,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit 5	80,000,000.00	

		Provinsi Kepri	Perizinannya				Provinsi Kepri	Perizinannya			
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit 8	1.000.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit 8	1.000.000.000,00	
26	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Aset dalam Pemeliharaan	500 Unit	2,020,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Aset dalam Pemeliharaan	500 Unit	2,020,000,000	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4 Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4 Unit	300.000.000,00	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4 Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4 Unit	300.000.000,00	
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	8 Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	8 Unit	300.000.000,00	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan		Persentase pimpinan dan anggota dprd yang	100%	1,300,000,000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan		Persentase pimpinan dan anggota dprd yang	100%	1,300,000,000	

	DPRD		terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraannya			DPRD		terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraannya			
23	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	13*45 Orang/Bulan	200,000,000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	13*45 Orang/Bulan	200,000,000	
24	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	650,000,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	650,000,000	
25	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	450,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	450,000,000	
9	Layanan Adminstrasi DPRD		Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD	12 Bulan	450,924,423.83	Layanan Adminstrasi DPRD		Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD	12 Bulan	450,924,423.83	
26	Fasilitasi Fraksi DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	450,924,423.83	Fasilitasi Fraksi DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	450,924,423.83	
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skors 74	71,710,404,638	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skors 74	71,710,404,638	

			Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %				Persentase Terlaksanaannya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %		
10	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	3 Dokumen	1,000,000,000	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	3 Dokumen	1,000,000,000	
27	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	300,000,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	300,000,000	
28	Pembahasan Rancangan Perda	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	300,000,000	Pembahasan Rancangan Perda	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	300,000,000	
29	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	200,000,000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	200,000,000	
30	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	200,000,000	

11	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)	2 Dokumen	500,000,000	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)	2 Dokumen	500,000,000	
31	Pembahasan APBD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Terlaksananya Pembahasan APBD	2 Dokumen	500,000,000	Pembahasan APBD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Terlaksananya Pembahasan APBD	2 Dokumen	500,000,000	
12	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	100%	8,400,000,000	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	100%	8,400,000,000	
32	Pendalaman Tugas DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	3,000,000,000	Pendalaman Tugas DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	3,000,000,000	
33	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	350,000,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	350,000,000	
34	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang	750,000,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang	750,000,000	
35	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Luar Daerah dan Dalam	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	36 Orang	1,800,000,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Luar Daerah dan Dalam	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	36 Orang	1,800,000,000	

		Daerah Provinsi Kepri					Daerah Provinsi Kepri				
36	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	2,500,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	2,500,000,000	
13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	7 Dapil	30,452,675,576	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	7 Dapil	30,452,675,576	
37	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1Laporan	1,252,675,576	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1Laporan	1,252,675,576	
38	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	200,000,000	
39	Pelaksanaan Reses	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	29,000,000,000	Pelaksanaan Reses	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	29,000,000,000	
14	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Jumlah sub kegiatan di kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terfasilitasi	100%	31,357,729,062	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Jumlah sub kegiatan di kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terfasilitasi	100%	33,550,000,000	

40	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	30,707,729,062	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	30,707,729,062	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	200,000,000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	200,000,000	
41	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	250,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	250,000,000	
42	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	200,000,000	
					156,098,334,849					156,098,334,849	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepri pada tahun 2023, merupakan hasil dari proses perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan (musrenbag prov) yang berdoman pada Isu Strategis dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi sekretariat DPRD tidak ada.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum PD dan juga berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang seperti Perangkat Daerah lainnya berada di bawah Kementrian Dalam Negeri, akan tetapi Sekretariat DPRD mempunyai tugas yang berbeda yaitu selain melaksanakan perintah dari Pemerintah Daerah secara operasional juga memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintahan Provinsi maupun Pusat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas maka produk hukum atau peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan diatasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan, yang implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

3.2 Arah Kebijakan Tahun ke 2 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2021-2026

Berdasarkan isu strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Pembangunan daerah pada Tahun 2023 diarahkan pada **“Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional.”**

3.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2

Pada tahun kedua ini, diharapkan Pandemi Covid-19 sudah tertangani dengan baik sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan normal kembali. Oleh karena itu, pada tahun kedua ini fokus pembangunan akan diarahkan pada akselerasi untuk meningkatkan ekonomi yang sudah pulih kembali. Beberapa strategi yang

akan difokuskan pada tahun kedua ini ialah peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi, jaminan pengembangan karir bagi apra ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap wilayah, peningkatan penataan desa dan kerjasama desa, peningkatan upaya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, optimalisasi penerapatan Free Trade Zone secara menyeluruh, pengembangan tourism linkage networking antar kabupaten dan kota, pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi), divesifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan daya saing UMKM, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan potensi PAD, kemudahan layanan perizinan dengan one day service, pemetaan potensi investasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri, peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, akselerasi pembangunan sarana dan prasaran Pendidikan, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, Pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, Pengembangan perikanan tangkap, Pengembangan perikanan budidaya, Pengembangan akses pasar

perikanan orientasi ekspor, Pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

3.4 Tujuan dan sasaran Renja Sekretaria DPRD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi dan terkait dengan Tujuan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, maka Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

Tujuan	SASARAN	Indikator tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan		Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	(Hasil Survey Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD : Sumber Data Laporan Akhir Kegiatan)	Skor	68	70	72	74	76	78	80	80
	1.Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	Layanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD sesuai SOP : Total Layanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah X 100	%	94	96	100	100	100	100	100	100
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Rapat yang terlaksana : Jumlah rapat yang terjadwan X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD	fasilitasi penyusunan laporan reses DPRD : Jumlah laporan reses per anggota DPRD X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi	jumlah pembahasan anggaran yang dilaksanakan : jadwal pembahasan anggaran	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

Tujuan	SASARAN	Indikator tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			menjadi perda									
	2.Meningkat nya layanan administrasi dan keuangan DPRD	Persentase layanan administrasi keuangan DPRD	layanan Administrasi Keuangan DPRD Sesuai SOP : Total Layanan Administrasi Keuangan DPRD X 100	%	94	96	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	Usur kegiatan pengumpuln data kinerja : Total unsur kegiatan pengumpulan data kinerja X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD yang disusun : jumlah laporan X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
	3.Terpenuhi nya kebutuhan sarana prasarana sekretariat DPRD	Persentase kecukupan sarana prasarana	Barang Inventaris yang Kondisi Baik : Total Barang Inventaris X 100	%	94	96	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD	Jumlah tenaga ahli fraksi : total tenaga ahli fraksi yang direncanakan X 100. (tenaga ahli fraksi 1 (satu) orang untuk setiap fraksi X 8 fraksi=8 orang	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

Tujuan	SASARAN	Indikator tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satua n	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	Jumlah layanan kepegawaian : Jumlah seluruh urusan	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase kecukupan penunjang fasilitas	Jumlah terlaksananya sub kegiatan : jumlah sub kegiatan yang direncanakan X100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan : total rekening yang terencanakan X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemeliharaan milik daerah	Jumlah barang yang terpelihara : jumlah barang milik daerah X 100	%	n/a	96	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD	Jumlah fraksi DPRD mendapat layanan administrasi : Jumlah fraksi DPRD X100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Setiap program memiliki indikator kinerja outcome, sedangkan kegiatan memiliki indikator kinerja output. Berikut ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD selama kurun waktu tahun 2021-2026.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan :

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Fasilitas Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Kegiatan :

9. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

1. Fasilitas Fraksi DPRD

II. PROGRAM DUKUNGANPELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Kegiatan :

10. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. Pembahasan Rancangan Perda
3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

11. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

1. Pembahasan APBD

Kegiatan :

12. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

1. Pendalaman Tugas DPRD
2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Kegiatan :

13. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3. Pelaksanaan Reses

Kegiatan :

14. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel . 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kepri

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	4. 02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	86,699,600,000				90,633,523,800
1	4. 02. 01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		1Dokumen	900,000,000			1Dokumen	900,000,000
1	4. 02. 01. 1.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1Dokumen	200,000,000
2	4. 02. 01. 1.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4. 02. 01. 1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
4	4. 02. 01. 1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	100,000,000
5	4. 02. 01. 1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Laporan	200,000,000	APBD		1 Laporan	200,000,000
2	4. 02. 01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya		100%	50,656,896,237			100%	54,185,030,697
6	4. 02. 01. 1.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Orang/Bulan	49,206,896,237	APBD		Orang/Bulan	52,735,030,697

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	4. 02. 01. 1.02. 01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	850,000,000	APBD		1 Dokumen	850,000,000
8	4. 02. 01. 1.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
9	4. 02. 01. 1.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
10	4. 02. 01. 1.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
3	4. 02. 01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		12 Bulan	1,500,000,000			12 Bulan	1,100,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	4. 02. 01. 1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Paket	500,000,000	APBD		1 Paket	500,000,000
12	4. 02. 01. 1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	60 Orang	300,000,000	APBD		60 Orang	300,000,000
13	4. 02. 01. 1.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	60 Orang	150,000,000	APBD		60 Orang	150,000,000
14	4. 02. 01. 1.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	60 Orang	150,000,000	APBD		60 Orang	150,000,000
4	4. 02. 01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana		12 Bulan	15,989,103,763			12 Bulan	17,453,887,315

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			aparatur							
15	4. 02. 01. 1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Paket	1,050,000,000	APBD		1 Paket	1,000,000,000
16	4. 02. 01. 1.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Paket	10,689,103,763	APBD		1 Paket	9,153,887,315
17	4. 02. 01. 1.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Kunjungan Tamu	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Laporan	6,300,000,000	APBD		1 Laporan	7,000,000,000
18	4. 02. 01. 1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Laporan	300,000,000	APBD		1 Laporan	300,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	4. 02. 01. 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan		10 Unit	3,000,000,000			10 Unit	3,000,000,000
	4. 02. 01. 1.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Paket	400,000,000	APBD		1 Paket	400,000,000.00
	4. 02. 01. 1.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	15 Unit	70,000,000	APBD		15 Unit	70,000,000.00
	4. 02. 01. 1.07. 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Unit	1,280,000,000	APBD		1 Unit	680,000,000.00
	4. 02. 01. 1.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	6 Unit	1,000,000,000	APBD		6 Unit	1,000,000,000.00

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. 02. 01. 1.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	6 Unit	850,000,000	APBD		6 Unit	850,000,000.00
6	4. 02. 01. 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan		12 Bulan	6,891,005,787			12 Bulan	7,891,005,788
20	4. 02. 01. 1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Laporan	2,000,000,000	APBD		1 Laporan	2,000,000,000
21	4. 02. 01. 1.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Laporan	4,891,005,787	APBD		1 Laporan	5,891,005,788
7	4. 02. 01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kondisi baik		100%	4,100,000,000			100%	4,100,000,000
	4. 02. 01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Luar Daerah	60 Unit	80,000,000.00			60 Unit	80,000,000.00

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.09. 01	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	dan Dalam Daerah Provinsi Kepri						
	4. 02. 01. 1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	60 Unit	20.000.000,00	APBD		60 Unit	20,000,000.00
	4. 02. 01. 1.09. 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Unit 5	80,000,000.00	APBD		Unit 5	80,000,000.00
	4. 02. 01. 1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Unit 8	1.000.000.000,00	APBD		Unit 8	1,000,000,000.00
22	4. 02. 01. 1.09. 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset dalam Pemeliharaan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi	500 Unit	2,020,000,000	APBD		500 Unit	2,020,000,000.00

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kepri						
	4. 02. 01. 1.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	4 Unit	700.000.000,00	APBD		4 Unit	300,000,000.00
	4. 02. 01. 1.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	4 Unit	700.000.000,00	APBD		4 Unit	300,000,000.00
	4. 02. 01. 1.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	8 Unit	500.000.000,00	APBD		8 Unit	300,000,000.00
8	4. 02. 01. 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya		100%	1,300,000,000			100%	1,300,000,000.00

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	4. 02. 01. 1.15. 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Provinsi Kepulauan Riau	45 Orang/ Bulan	200,000,000	APBD		45 Orang/ Bulan	200,000,000.00
24	4. 02. 01. 1.15. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Paket	650,000,000	APBD		1 Paket	650,000,000.00
25	4. 02. 01. 1.15. 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Provinsi Kepulauan Riau	45 orang	450,000,000	APBD		45 orang	450,000,000.00
9	4. 02. 01. 1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD		12 Bulan	450,924,423.83			12 Bulan	703,600,000.00
26	4. 02. 01. 1.16. 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Laporan	450,924,423.83	APBD		1 Laporan	703,600,000
	4. 02. 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD		Skors 74	71,710,404,638				68,974,967,719
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100 %					

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	4. 02. 02. 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi		Dokumen	1,000,000,000			Dokumen	1,000,000,000
27	4. 02. 02. 1.01. 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	300,000,000	APBD		1 Dokumen	300,000,000
28	4. 02. 02. 1.01. 01	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	300,000,000	APBD		1 Dokumen	300,000,000
29	4. 02. 02. 1.01. 01	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
30	4. 02. 02. 1.01. 01	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	4. 02. 02. 1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)		2 Dokumen	500,000,000			2 Dokumen	500,000,000
31	4. 02. 02. 1.02. 01	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	2 Dokumen	500,000,000			2 Dokumen	500,000,000
12	4. 02. 02. 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan		100%	8,400,000,000			100%	5,400,000,000
32	4. 02. 02. 1.04. 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	3,000,000,000	APBD		1 Dokumen	1,000,000,000
33	4. 02. 02. 1.04. 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	1,350,000,000	APBD		1 Dokumen	350,000,000

45

250

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	4. 02. 02. 1.04. 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	36 Orang	750,000,000	APBD		36 Orang	750,000,000
35	4. 02. 02. 1.04. 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	36 Orang	1,950,000,000	APBD		36 Orang	1,800,000,000
36	4. 02. 02. 1.04. 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	2,500,000,000	APBD		1 Dokumen	1,500,000,000
13	4. 02. 02. 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil		7 Dapil	30,452,675,576			7 Dapil	30,676,774,757
37	4. 02. 02. 1.05. 01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi	1Laporan	1,252,675,576	APBD		1Laporan	1,476,774,757

2

36

24

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kepri						
38	4. 02. 02. 1.05. 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
39	4. 02. 02. 1.05. 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	29,000,000,000	APBD		1 Dokumen	29,000,000,000
14	4. 02. 02. 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Jumlah sub kegiatan di kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terfasilitasi		100%	33,550,000,000			100%	31,398,192,962
40	4. 02. 02. 1.08. 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	30,707,729,062	APBD		1 Dokumen	30,748,192,962

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. 02. 02. 1.08. 03	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Laporan	200,000,000	APBD		1 Laporan	200,000,000
41	4. 02. 02. 1.08. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	250,000,000	APBD		1 Dokumen	250,000,000
42	4. 02. 02. 1.08. 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
						161,198,334,849				159,608,491,519

BAB V

PENUTUP

RENJA – Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah disajikan ini merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Instansi Pemerintah. Diharapkan Renja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memberikan pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau harus selalu tampil dengan pelayanan prima sebagai fasilitator DPRD pada setiap kegiatan

Tanjungpinang, Februari 2022
**SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



MARTIN LUTHER MAROMON, S.Sos M.Si
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19670306 199703 1 004